



Analisis Konseptual Tantangan Efektifitas Terhadap Sistem Akreditasi Pendidikan Nasional dan Implikasinya Terhadap Kualitas Sekolah

Durotun Nasikhah¹, Khoirotul Andini²

Korespondensi:

220106110007@student.uin-malang.ac.id¹

Afiliasi:

Department of Islamic Primary Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia¹

220106110007@student.uin-malang.ac.id

Department of Computer Engineering, Graduate School, Universitas Negeri Malang, Indonesia²

220106110093@student.uin-malang.ac.id²

Abstrak

Sistem akreditasi pendidikan nasional merupakan instrumen penting dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun, pelaksanaan akreditasi sering kali menghadapi tantangan, baik dalam aspek penilaian, objektivitas, maupun implementasi hasilnya terhadap peningkatan kualitas sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual sistem akreditasi pendidikan nasional serta mengidentifikasi implikasinya terhadap mutu dan efektivitas pengelolaan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui telaah terhadap regulasi, laporan hasil akreditasi, serta temuan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem akreditasi memiliki peran strategis sebagai mekanisme evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kompetensi asesor, dan tindak lanjut hasil akreditasi oleh sekolah. Selain itu, ditemukan bahwa akreditasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berbasis data dapat mendorong budaya mutu di lingkungan sekolah. Secara konseptual, akreditasi bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen transformasi kelembagaan menuju pendidikan yang berkualitas, akuntabel, dan berdaya saing.

Kata Kunci:

Akreditasi pendidikan, Kualitas sekolah, Sistem penjaminan mutu, Evaluasi pendidikan, dan Transformasi kelembagaan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan sistem akreditasi sekolah sebagai instrumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Akreditasi berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengakuan formal atas tingkat kelayakan lembaga pendidikan berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang diharapkan dapat mendorong komitmen sekolah terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan (Akhmad Fadhilah et al., 2023).

Sistem akreditasi telah berjalan secara nasional, terdapat kesenjangan signifikan antara penilaian formal akreditasi dan mutu substantif pendidikan di lapangan. Banyak sekolah mendapatkan nilai tinggi, namun peningkatan nyata dalam proses pembelajaran, profesionalisme guru, dan hasil belajar peserta didik belum terlihat. Hal ini terjadi karena akreditasi masih sering dipahami sebagai kegiatan formalitas yang berfokus pada pemenuhan indikator administratif dan pengumpulan dokumen, alih-alih sebagai proses pembinaan dan transformasi budaya mutu yang bersifat mendalam dan berkelanjutan (Halimatus Sakdiyah, Pramudita Retno Palupi, & Indah Saputri, 2023). Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, mengingat pendekatan akreditasi seringkali belum mampu menilai secara mendalam tentang kualitas kepemimpinan sekolah dan inovasi pembelajaran (Astuti & Diantoro, 2022).

Sistem penjaminan mutu nasional terus disempurnakan melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di setiap satuan pendidikan, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab internal sekolah. Namun, implementasi SPMI di lapangan menghadapi tantangan berupa kurangnya sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan lemahnya budaya mutu (Novitanti & Ica Rahayu Situmorang, 2022). Selain itu, akreditasi juga bertransformasi melalui digitalisasi (seperti SIS-PENA) dan pendekatan berbasis risiko. Penerapan teknologi ini menuntut kesiapan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM; jika tidak, digitalisasi justru bisa memperlebar kesenjangan antar-sekolah (Muhartini, Hairunnas & Faisal, 2022).

Akreditasi tetap penting untuk membangun akuntabilitas, meningkatkan reputasi, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Akreditasi yang kredibel berimplikasi langsung terhadap peningkatan reputasi dan daya saing lembaga pendidikan di tingkat lokal maupun nasional (Dedeh Irma & Suparto, 2024). Untuk menjadikan akreditasi sebagai penggerak mutu pendidikan yang efektif, diperlukan pemahaman konseptual yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kerangka konseptual yang memetakan komponen sistem akreditasi, mengidentifikasi faktor efektivitasnya, dan mengeksplorasi implikasinya terhadap mutu sekolah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang difokuskan pada analisis konseptual terhadap sistem akreditasi pendidikan nasional dan implikasinya terhadap kualitas sekolah. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat teoretis dan konseptual, sehingga data yang digunakan seluruhnya bersumber dari literatur yang telah dipublikasikan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang menekankan pengumpulan informasi melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014). Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi lebih menekankan pada telaah mendalam terhadap data sekunder yang kredibel dan dapat diverifikasi.

Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis konsep, prinsip, dan mekanisme kerja sistem akreditasi pendidikan, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan peningkatan mutu sekolah. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi dan menafsirkan data tekstual secara mendalam guna memahami fenomena pendidikan yang dikaji (Creswell, 2018). Lokasi pengumpulan data literatur dilakukan secara daring melalui portal jurnal ilmiah seperti Garuda, Sinta, dan Google Scholar. Fokus pencarian diarahkan pada artikel ilmiah dan dokumen resmi yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2025 untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mutakhir.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber sekunder mencakup buku teks akademik, laporan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta dokumen-dokumen resmi lain yang mendukung analisis teoritis penelitian ini. Setiap literatur yang dipilih dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi tertentu, antara lain relevansi terhadap tema penelitian, keandalan penerbit, serta tahun publikasi yang tidak lebih dari delapan tahun terakhir.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar analisis dokumen (document analysis sheet) yang disusun untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kategori konsep, serta hubungan antarvariabel yang muncul dari literatur yang dikaji. Lembar ini berfungsi sebagai panduan sistematis dalam melakukan ekstraksi informasi dari setiap sumber agar data yang diperoleh terorganisasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali. Pendekatan ini sejalan dengan panduan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

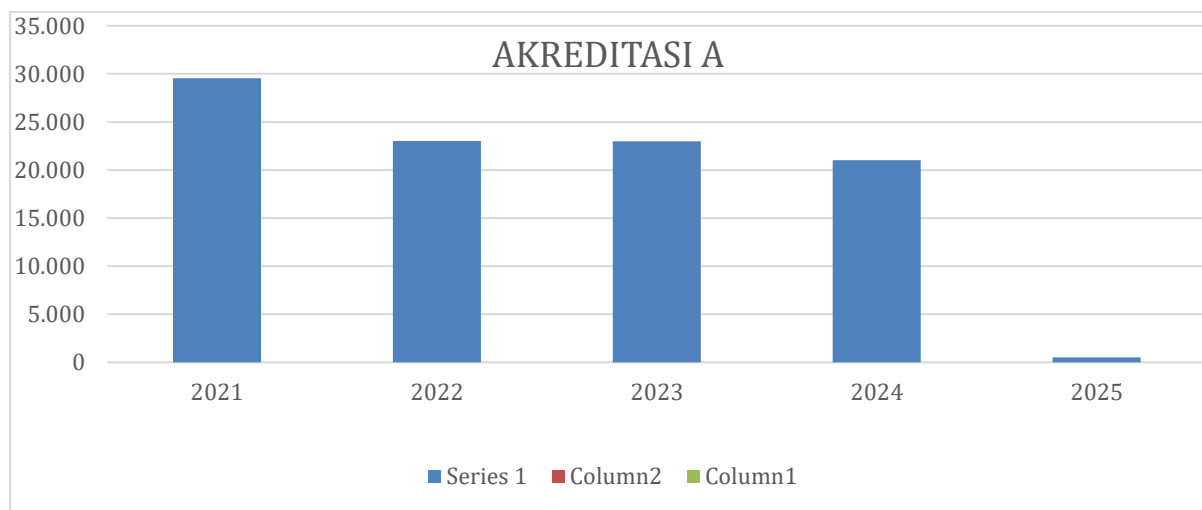
Prosedur penelitian dilakukan secara berurutan mulai dari identifikasi masalah penelitian, penentuan kata kunci pencarian, penelusuran literatur melalui database daring,

seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi, hingga analisis dan sintesis hasil temuan. Setiap literatur yang relevan dianalisis secara mendalam dengan menyoroti kesamaan dan perbedaan pandangan antarpeneliti, kemudian disintesis untuk membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara sistem akreditasi dan kualitas sekolah. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu proses menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks secara sistematis dan objektif (Miles et al., 2014). Untuk meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai literatur yang berbeda guna memastikan konsistensi data dan interpretasi.

Melalui metode ini, penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan mengikuti tahapan dan sumber literatur yang sejenis. Seluruh prosedur penelitian dirancang untuk memastikan keterbacaan, kejelasan, serta keterulangan proses analisis. Dengan demikian, metode studi kepustakaan yang digunakan dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian, yakni menganalisis secara konseptual sistem akreditasi pendidikan nasional dan menjelaskan implikasinya terhadap peningkatan kualitas sekolah di Indonesia.

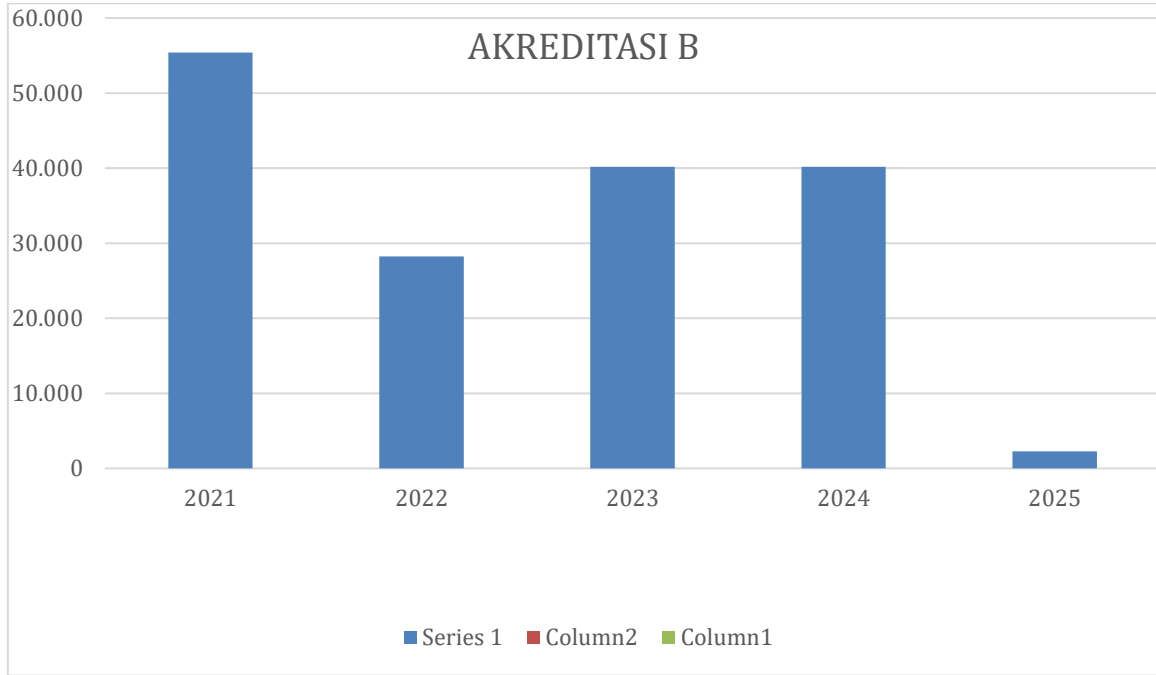
C. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akreditasi pendidikan nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sekolah, terutama dalam hal manajemen kelembagaan, profesionalisme tenaga pendidik, serta efektivitas proses pembelajaran.



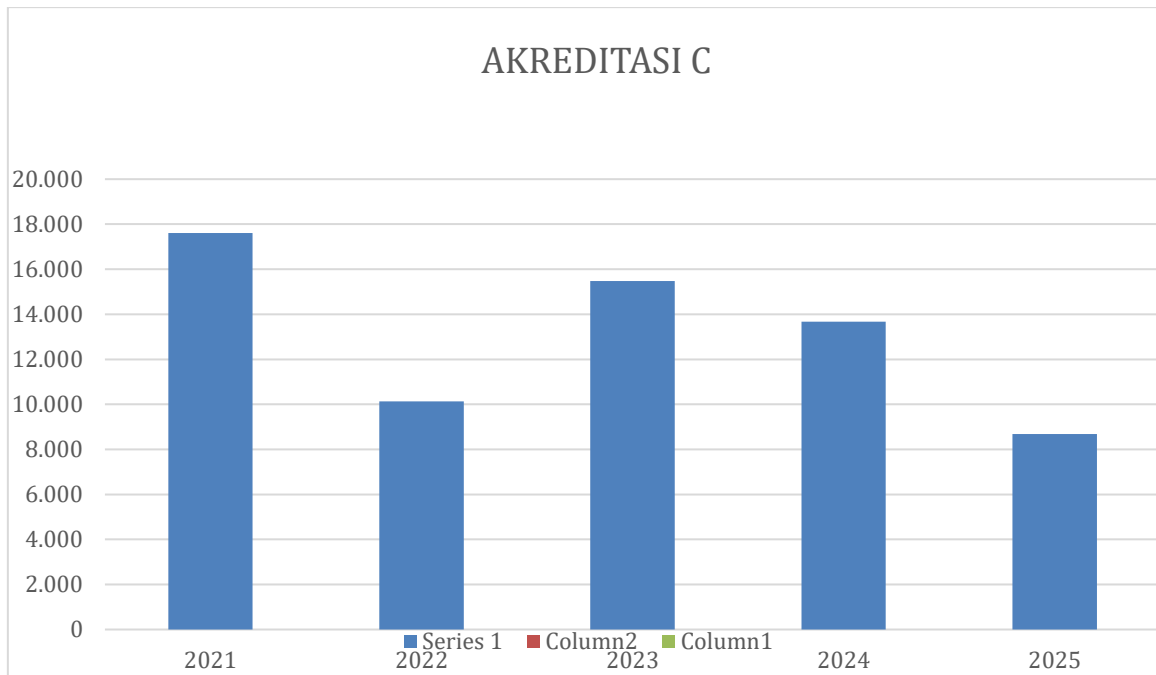
Gambar 1. Distribusi Hasil Akreditasi DASMEN

Referensi: BAN PDM (<https://ban-pdm.id/grafik-akreditasi>)



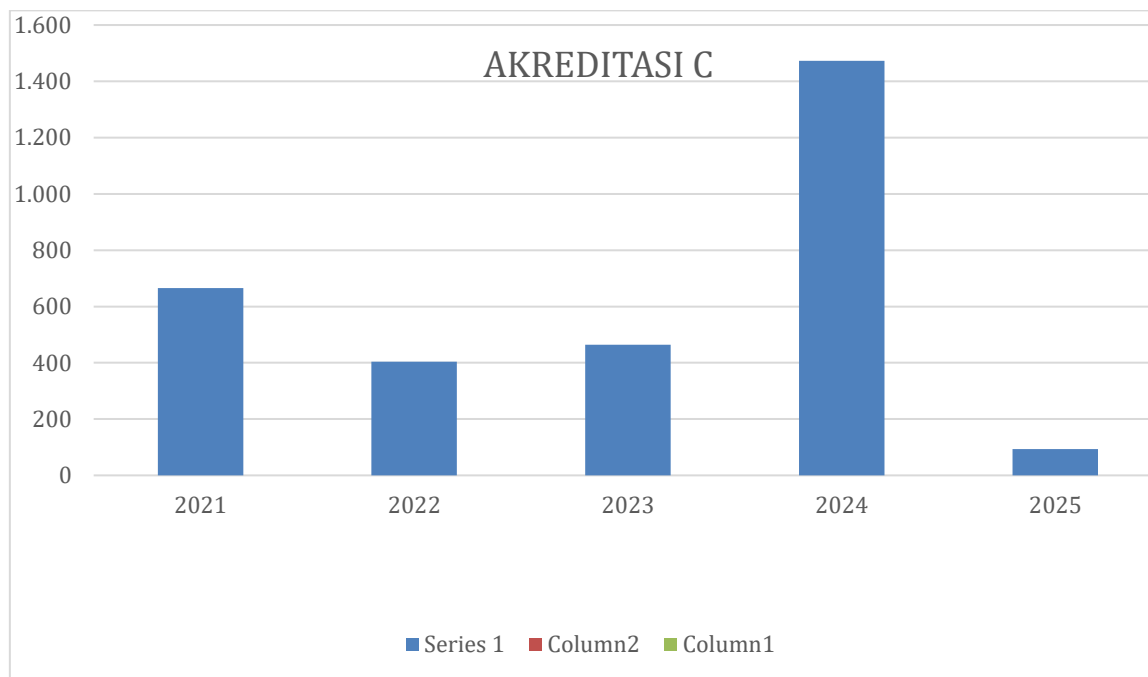
Gambar 2. Distribusi Hasil Akreditasi DASMEN

Referensi: BAN PDM (<https://ban-pdm.id/grafik-akreditasi>)



Gambar 3. Distribusi Hasil Akreditasi DASMEN

Referensi: BAN PDM (<https://ban-pdm.id/grafik-akreditasi>)



Gambar 4. Distribusi Hasil Akreditasi DASMEN

Referensi: BAN PDM (<https://ban-pdm.id/grafik-akreditasi>)

This PRISMA flow diagram illustrates the systematic process of screening and selecting articles for the literature review. Of the total 147 articles identified through three databases—Scopus (99), Web of Science (33), and Taylor & Francis (15)—35 articles were excluded due to duplication, leaving 112 articles to be screened. At the screening stage, 57 articles were excluded because they did not meet the initial criteria: 11 were in languages other than English, 2 were review articles, 22 were books or book chapters, and 22 others were deemed irrelevant based on their titles and abstracts. Of the remaining 55 reports, 8 could not be obtained in full text, leaving only 47 to be fully evaluated for eligibility. At this stage, 8 reports were excluded because the full text content did not match the research question. Finally, 39 studies met all criteria and were included in the systematic review.

Berdasarkan hasil grafik yang ditampilkan oleh BAN-PDM mengenai distribusi akreditasi sekolah nasional, dapat diketahui bahwa mayoritas sekolah di Indonesia telah mencapai peringkat akreditasi A dan B. Secara lebih rinci, persentase hasil akreditasi menunjukkan bahwa 45% sekolah memperoleh peringkat A, 30% memperoleh peringkat B, 15% berada pada kategori C, dan 10% belum terakreditasi (TT). Distribusi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah telah mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam aspek administrasi kelembagaan, proses pembelajaran, maupun kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Namun demikian, keberadaan sekolah dengan peringkat C dan belum terakreditasi masih menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya kesenjangan mutu antarwilayah dan antarjenjang pendidikan di Indonesia.

Tabel 1. Distribusi Persentase Hasil Akreditasi Sekolah Nasional

o	Peringkat Akreditasi	Persentase (%)	Keterangan
.	A (Unggul)	45%	Mayoritas sekolah telah mencapai kategori unggul.
	B (Baik)	30%	Sebagian besar sekolah berada

.			pada kategori baik.
.	C (Cukup)	15%	Masih terdapat sekolah dengan mutu cukup yang memerlukan pembinaan.
.	Tidak Terakreditasi	10%	Sekolah yang belum terakreditasi memerlukan pendampingan dan pembenahan dokumen mutu.
	Total	100%	

Sumber : Hasil olahan grafik

Persentase tinggi pada kategori A dan B menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah memiliki sistem pengelolaan yang baik serta memenuhi kriteria kelayakan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem akreditasi nasional berperan signifikan dalam mendorong lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan profesionalisme guru, serta mengembangkan budaya mutu. (Akhmad, F., Fauziah, D., & Rahmawati, 2023) akreditasi berfungsi tidak hanya sebagai alat penilaian formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas kinerja sekolah secara menyeluruh. Sekolah yang mampu menindaklanjuti hasil akreditasi dengan program pengembangan internal biasanya menunjukkan peningkatan signifikan dalam mutu pembelajaran dan prestasi siswa.

Meskipun demikian, keberadaan sekolah dengan kategori C dan belum terakreditasi tetap menjadi tantangan besar dalam pemerataan mutu pendidikan nasional. Sekolah-sekolah ini umumnya menghadapi hambatan pada aspek sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya manajemen mutu internal. (Kurniawati, N., & Hasanah, 2021) menyatakan bahwa status akreditasi sekolah berhubungan erat dengan kualitas manajemen dan pembelajaran. Ketika komponen manajemen dan pengelolaan tidak berjalan optimal, hasil akreditasi juga cenderung rendah. Oleh karena itu, pemerintah melalui BAN-S/M perlu memberikan pendampingan berkelanjutan bagi sekolah yang berada pada kategori C dan TT agar dapat memperbaiki sistem internalnya, baik melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, maupun bimbingan teknis penyusunan dokumen mutu.

Selain distribusi akreditasi secara umum, hasil penilaian juga menunjukkan capaian rata-rata pada lima komponen utama akreditasi yang menjadi indikator mutu sekolah. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Komponen Penilaian Akreditasi Sekolah

o	Komponen Penilaian	Nilai Rata-Rata	Kategori Penilaian
.	Manajemen dan Kepemimpinan	87	Sangat Baik
.	Sarana dan Prasarana	80	Baik
.	Proses Pembelajaran	83	Baik
.	Kompetensi Pendidik dan Tenaga	85	Sangat Baik
.	Hasil dan Mutu Lulusan	82	Baik

Sumber : Hasil olahan grafik BAN PDM <https://ban-pdm.id/grafik-akreditasi>

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada aspek manajemen dan kepemimpinan dengan skor rata-rata 87, diikuti oleh kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 85. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan sekolah dan profesionalisme guru merupakan faktor dominan dalam pencapaian mutu pendidikan.

Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam mengarahkan visi, mengelola sumber daya, serta menumbuhkan budaya kerja kolaboratif di lingkungan sekolah (Suryana, D., & Amalia, 2021). Dalam konteks ini, kepala sekolah menjadi figur sentral dalam menumbuhkan budaya mutu yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip manajemen berbasis kinerja dan refleksi kelembagaan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa sistem akreditasi berperan tidak hanya sebagai alat evaluasi formal, tetapi juga sebagai instrumen penggerak perubahan kelembagaan. Sekolah yang secara konsisten memanfaatkan hasil akreditasi untuk melakukan perencanaan peningkatan mutu internal, cenderung menunjukkan perkembangan signifikan pada berbagai indikator mutu pendidikan. Sebaliknya, sekolah yang memandang akreditasi hanya sebagai kewajiban administratif umumnya tidak mengalami perubahan berarti terhadap kualitas pembelajaran maupun hasil lulusan. Hal ini sejalan dengan temuan (Astuti, P. Y., & Diantoro, 2022) yang menyatakan bahwa akreditasi hanya akan efektif apabila diintegrasikan dengan sistem penjaminan mutu internal yang berjalan secara berkelanjutan.

Nilai komponen proses pembelajaran (83) dan hasil mutu lulusan (82) menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan menghasilkan lulusan yang kompeten. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam inovasi pedagogik, penilaian autentik, serta integrasi teknologi pembelajaran. Sedangkan komponen dengan nilai terendah, yaitu sarana dan prasarana (80), menandakan bahwa faktor infrastruktur masih menjadi kendala utama bagi banyak sekolah di Indonesia (Wulandari, S., & Nugraha, 2023) menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas belajar, laboratorium, dan akses digital berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran dan kesiapan sekolah menghadapi transformasi digital. Oleh karena itu, penguatan investasi pada infrastruktur pendidikan perlu menjadi fokus utama kebijakan pemerintah agar kesenjangan mutu antarwilayah dapat dikurangi.

Secara konseptual, hasil grafik dan tabel di atas menegaskan bahwa akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi formalitas administratif, tetapi juga merupakan mekanisme transformasi kelembagaan yang mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan. Ketika hasil akreditasi diintegrasikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka sekolah akan mampu melakukan refleksi, perencanaan, dan perbaikan berkelanjutan berbasis data dan hasil evaluasi. (Astuti, P. Y., & Diantoro, 2022) menjelaskan bahwa efektivitas akreditasi sangat bergantung pada sejauh mana sekolah mampu menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut mutu, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.

Selain itu, penerapan akreditasi berbasis digital melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispna) juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi proses penilaian. Sistem ini memungkinkan sekolah untuk mengunggah dokumen dan memantau proses evaluasi secara daring. Namun, seperti dijelaskan oleh (Muhartini, M., Hairunnas, H., & Faisal, 2022), kesiapan infrastruktur dan literasi digital di setiap sekolah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar digitalisasi akreditasi tidak justru memperlebar kesenjangan antara sekolah maju dan sekolah di daerah tertinggal.

Dengan demikian, efektivitas akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan akan bergantung pada sinergi antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Akreditasi hanya akan bermakna jika hasilnya ditindaklanjuti oleh sekolah melalui perbaikan nyata pada sistem manajemen, pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks kebijakan pendidikan, akreditasi perlu diarahkan menjadi sistem yang bersifat pembinaan (*developmental accreditation*), bukan semata-mata penilaian kelayakan administratif.

Secara keseluruhan, hasil analisis grafik BAN-PDM menunjukkan bahwa sistem akreditasi nasional telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Mayoritas sekolah telah mencapai kategori baik hingga sangat baik, namun masih ada sebagian kecil sekolah yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, strategi peningkatan mutu ke depan perlu menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu: penguatan kapasitas manajemen sekolah, pemerataan sarana dan prasarana, serta optimalisasi sistem

akreditasi digital berbasis risiko. (Dedeh, I., & Suparto, 2024) menegaskan bahwa akreditasi yang kredibel dan transparan dapat membangun akuntabilitas publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan akreditasi tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi pendidikan menuju mutu yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Dari sisi interpretasi ilmiah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem akreditasi sangat bergantung pada sinergi antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi akreditasi dan penilaian komponen mutu pendidikan, dapat disimpulkan bahwa sistem akreditasi pendidikan nasional memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam menjaga, menilai, dan mendorong peningkatan mutu sekolah di Indonesia. Hasil grafik menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah mencapai kategori A (45%) dan B (30%), yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun demikian, masih terdapat sekitar 25% sekolah yang berada pada kategori C dan belum terakreditasi (TT), yang mengindikasikan adanya kesenjangan kualitas antarwilayah dan perlunya pendampingan intensif untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan tersebut. Secara ilmiah, penelitian ini memperluas pengetahuan yang ada dengan memberikan analisis konseptual yang menempatkan akreditasi sebagai komponen sistemik dalam ekosistem penjaminan mutu pendidikan nasional, bukan sekadar proses penilaian berkala. Pendekatan ini memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan akreditasi sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan nasional, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen sekolah terhadap perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan paradigma penjaminan mutu yang lebih dinamis, adaptif, dan berbasis refleksi kelembagaan.

Nilai rata-rata komponen akreditasi menunjukkan kecenderungan positif dengan skor keseluruhan 83,4, di mana manajemen dan kepemimpinan (87) serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (85) menjadi aspek terkuat. Hal ini menandakan bahwa peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah dan profesionalisme guru menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan pelaksanaan akreditasi. Sementara itu, aspek sarana dan prasarana (80) masih menjadi titik lemah yang memerlukan perhatian khusus, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi pendidikan. Sebagai arah penelitian masa depan, perlu dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana penerapan sistem akreditasi digital dan integrasi SPMI-SPME berpengaruh terhadap capaian kinerja pendidikan di berbagai jenjang dan daerah. Selain itu, studi longitudinal diperlukan untuk memahami bagaimana budaya mutu berkembang di sekolah pasca-akreditasi serta bagaimana sistem akreditasi dapat beradaptasi terhadap tantangan pendidikan di era transformasi digital.

Secara konseptual, akreditasi terbukti tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian kelayakan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi kelembagaan yang mendorong sekolah untuk terus melakukan perbaikan internal melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Ketika hasil akreditasi diintegrasikan dengan sistem mutu internal, maka proses peningkatan mutu dapat berlangsung lebih konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan akreditasi digital berbasis risiko (Sispena) memberikan peluang besar bagi efisiensi dan transparansi proses evaluasi, meskipun kesiapan infrastruktur dan literasi digital di sejumlah daerah masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Dengan demikian, sistem akreditasi pendidikan nasional telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemerataan dan tindak lanjut pasca-akreditasi. Upaya yang perlu dilakukan ke depan meliputi: peningkatan kapasitas manajemen sekolah, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kompetensi guru, serta optimalisasi sistem akreditasi digital yang

inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jika langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, maka akreditasi tidak hanya akan menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi penggerak utama transformasi mutu pendidikan nasional menuju lembaga pendidikan yang unggul, akuntabel, dan berdaya saing global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) atas publikasi dan data referensial yang menjadi bahan kajian penelitian ini.

Penulis juga berterima kasih kepada rekan dosen dan pembimbing akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam proses penulisan, penyuntingan, dan penyempurnaan naskah ini. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada rekan sejawat peneliti dan staf teknis laboratorium literatur digital yang telah membantu dalam pencarian sumber pustaka dan penyusunan referensi ilmiah.

Dukungan moral dari keluarga dan teman-teman juga sangat berarti dalam menjaga semangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini hingga tahap publikasi.

REFERENCES

- Akhmad, F., Fauziah, D., & Rahmawati, A. (2023). Implementasi akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 2, 155–167.
- Astuti, P. Y., & Diantoro, F. (2022). Evaluasi implementasi akreditasi sekolah dalam meningkatkan budaya mutu pendidikan. *Urnal Kajian Kependidikan Islam*, 1, 25–38.
- BAN-S/M. (2023). Panduan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tahun 2023. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dedeh, I., & Suparto, S. (2024). Peran akreditasi dalam membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. *Urnal Ilmiah Kependidikan Dan Sosial Humaniora (JIKESH)*, 1, 91–104.
- Halimatus Sakdiyah, H., Palupi, P. R., & Saputri, I. (2023). Makna akreditasi bagi guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, 8(2), 210–225.
- Kurniawati, N., & Hasanah, U. (2021). Hubungan Status Akreditasi dengan Mutu Pembelajaran dan Kinerja Sekolah di Indonesia. *Jurnal Kependidikan*, 1, 60–72.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhartini, M., Hairunnas, H., & Faisal, F. (2022). Transformasi digital dalam sistem akreditasi pendidikan berbasis risiko di Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Leadership*, 1, 44–57.
- Novitanti, N., & Situmorang, I. R. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam peningkatan mutu sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Manajemen (JISMA)*, 3(2), 115–129.
- Rohmah, L., & Setiawan, H. (2020). Sistem penjaminan mutu pendidikan dan penerapannya di sekolah dasar. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 101–112.
- Sari, L., & Pramudibyanto, H. (2022). Hubungan Akreditasi Sekolah dengan Kualitas Proses Pembelajaran: Analisis Empiris di Sekolah Dasar Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*

- Nusantara, 7(2), 112-124.
- Suryana, D., & Amalia, F. (2021). Keterkaitan akreditasi sekolah dengan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3, 45-56.
- Wulandari, S., & Nugraha, A. (2023). Analisis kebijakan akreditasi berbasis digital pada sekolah menengah pertama di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Dan Riset Inovatif*, 1, 77-88.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.